



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya bencana nasional nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 96.640.750.100,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penerimaan ADD tahun sebelumnya;
 - b. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - c. penurunan jumlah penduduk miskin Desa.
- (3) Besaran ADD dihitung dengan cara:
 - a. $ADD \text{ awal suatu Desa} = (ADD \text{ Tahun sebelumnya} + Rp 20.000.000,00)$.
 - b. ADD Kabupaten setelah dikurangi ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebagai *reward* kepada 2 (dua) Desa yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi, dengan proporsi pembagian sebagai berikut:
 1. Peringkat I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. Peringkat II sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. ADD awal yang ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperhitungkan sesuai dengan pengurangan jumlah ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rumus pengurangan sebagai berikut:
 1. Desa dengan penerimaan ADD awal sampai dengan Rp 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus juta Rupiah) dikenakan pengurangan sebesar 0% (nol persen);

2. Desa dengan penerimaan ADD awal lebih dari Rp 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dikenakan pengurangan sebesar 9% (sembilan persen);
3. Desa dengan penerimaan ADD awal lebih dari Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
4. Desa dengan penerimaan ADD awal lebih dari Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dikenakan pengurangan sebesar 11% (sebelas persen).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diutamakan untuk pemenuhan standar terendah penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - b. pemenuhan tunjangan dan belanja operasional BPD;
 - c. pemenuhan belanja operasional pemerintah Desa; dan
 - d. pemenuhan belanja untuk penanganan bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) *dihapus*.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penyaluran triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari 2020.

(3) Permohonan penyaluran ADD triwulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan berikutnya berakhir.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran triwulan pertama :

1. Lurah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) kwitansi; dan
 - d) fotokopi nomor Rekening Kas Desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - d) fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - f) kwitansi; dan
 - g) fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).

b. Penyaluran triwulan berikutnya :

1. Lurah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ; dan
 - c) kwitansi.

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut pada angka 1, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - e) kwitansi.
3. Khusus permohonan pencairan ADD triwulan II, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Desa mengajukan ADD sebesar jumlah kebutuhan untuk belanja Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Desa, Tunjangan BPD, belanja operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD untuk 3 (tiga) bulan dibuktikan dengan rekapitulasi jumlah kebutuhan belanjanya dan ditandatangani oleh Lurah;
 - b) Bagi Desa yang akan mengajukan ADD sebesar pagu yang ditetapkan, permohonan agar dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APBDesa untuk penanganan bencana non alam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

(2) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa segera melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 menyesuaikan alokasi penerimaan dana transfer ADD berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 46

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN
 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020

PERUBAHAN PENGALOKASIAN ADD DAN BESARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	PAGU DESA TA 2020 (Rp)	PAGU DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	ALOKASI PER TRIWULAN			
				TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
1	PONCOSARI	1,781,346,000	1,603,211,000	445,336,500.00	445,336,500.00	445,336,500.00	267,201,500.00
2	TRIMURTI	1,575,153,000	1,417,637,000	393,788,250.00	393,788,250.00	393,788,250.00	236,272,250.00
3	GADINGSARI	1,516,357,000	1,364,720,000	379,089,250.00	379,089,250.00	379,089,250.00	227,452,250.00
4	GADINGHARJO	987,830,000	987,830,000	246,957,500.00	246,957,500.00	246,957,500.00	246,957,500.00
5	SRIGADING	1,418,973,000	1,291,265,000	354,743,250.00	354,743,250.00	354,743,250.00	227,035,250.00
6	MURTIGADING	1,365,144,000	1,242,281,000	341,286,000.00	341,286,000.00	341,286,000.00	218,423,000.00
7	TIRTOMULYO	1,250,859,000	1,138,281,000	312,714,750.00	312,714,750.00	312,714,750.00	200,136,750.00
8	PARANGTRITIS	1,256,187,000	1,143,130,000	314,046,750.00	314,046,750.00	314,046,750.00	200,989,750.00
9	DONOTIRTO	1,239,905,000	1,128,313,000	309,976,250.00	309,976,250.00	309,976,250.00	198,384,250.00
10	TIRTOSARI	969,200,000	969,200,000	242,300,000.00	242,300,000.00	242,300,000.00	242,300,000.00
11	TIRTOHARGO	953,530,000	953,530,000	238,382,500.00	238,382,500.00	238,382,500.00	238,382,500.00
12	SELOHARJO	1,675,154,000	1,507,638,000	418,788,500.00	418,788,500.00	418,788,500.00	251,272,500.00
13	PANJANGREJO	1,509,334,000	1,358,400,000	377,333,500.00	377,333,500.00	377,333,500.00	226,399,500.00
14	SRIHARDONO	1,628,381,000	1,465,540,000	407,095,250.00	407,095,250.00	407,095,250.00	244,254,250.00
15	SIDOMULYO	1,618,024,000	1,456,220,000	404,506,000.00	404,506,000.00	404,506,000.00	242,702,000.00
16	MULYODADI	1,512,889,000	1,361,600,000	378,222,250.00	378,222,250.00	378,222,250.00	226,933,250.00
17	SUMBERMULYO	1,624,607,000	1,462,146,000	406,151,750.00	406,151,750.00	406,151,750.00	243,690,750.00
18	CATURHARJO	1,364,252,000	1,241,469,000	341,063,000.00	341,063,000.00	341,063,000.00	218,280,000.00
19	TRIHARJO	1,506,810,000	1,356,120,000	376,702,500.00	376,702,500.00	376,702,500.00	226,012,500.00
20	GILANGHARJO	1,817,612,000	1,635,850,000	454,403,000.00	454,403,000.00	454,403,000.00	272,641,000.00
21	WIJIREJO	1,207,036,000	1,098,402,000	301,759,000.00	301,759,000.00	301,759,000.00	193,125,000.00

NO	DESA	PAGU DESA TA 2020 (Rp)	PAGU DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	ALOKASI PER TRIWULAN			
				TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
22	TRIWIDADI	1,931,904,000	1,738,700,000	482,976,000.00	482,976,000.00	482,976,000.00	289,772,000.00
23	SENDANGSARI	1,940,114,000	1,743,100,000	485,028,500.00	485,028,500.00	485,028,500.00	288,014,500.00
24	GUWOSARI	1,611,950,000	1,450,750,000	402,987,500.00	402,987,500.00	402,987,500.00	241,787,500.00
25	PALBAPANG	1,284,134,000	1,168,561,000	321,033,500.00	321,033,500.00	321,033,500.00	205,460,500.00
26	RINGINHARJO	980,051,000	980,051,000	245,012,750.00	245,012,750.00	245,012,750.00	245,012,750.00
27	BANTUL	1,218,827,000	1,109,132,000	304,706,750.00	304,706,750.00	304,706,750.00	195,011,750.00
28	TRIRENGGO	1,631,607,000	1,468,440,000	407,901,750.00	407,901,750.00	407,901,750.00	244,734,750.00
29	SABDODADI	832,802,000	832,802,000	208,200,500.00	208,200,500.00	208,200,500.00	208,200,500.00
30	PATALAN	1,637,686,000	1,473,910,000	409,421,500.00	409,421,500.00	409,421,500.00	245,645,500.00
31	CANDEN	1,513,996,000	1,362,590,000	378,499,000.00	378,499,000.00	378,499,000.00	227,093,000.00
32	SUMBERAGUNG	1,571,484,000	1,414,335,000	392,871,000.00	392,871,000.00	392,871,000.00	235,722,000.00
33	TRIMULYO	1,639,080,000	1,475,170,000	409,770,000.00	409,770,000.00	409,770,000.00	245,860,000.00
34	SELOPAMIORO	2,459,462,000	2,184,921,000	614,865,500.00	614,865,500.00	614,865,500.00	340,324,500.00
35	SRIHARJO	1,312,840,000	1,194,684,000	328,210,000.00	328,210,000.00	328,210,000.00	210,054,000.00
36	WUKIRSARI	1,945,457,000	1,750,900,000	486,364,250.00	486,364,250.00	486,364,250.00	291,807,250.00
37	KEBONAGUNG	710,533,000	710,533,000	177,633,250.00	177,633,250.00	177,633,250.00	177,633,250.00
38	KARANGTENGAH	1,060,934,000	1,060,934,000	265,233,500.00	265,233,500.00	265,233,500.00	265,233,500.00
39	GIRIREJO	801,224,000	801,224,000	200,306,000.00	200,306,000.00	200,306,000.00	200,306,000.00
40	KARANGTALUN	718,242,000	718,242,000	179,560,500.00	179,560,500.00	179,560,500.00	179,560,500.00
41	IMOGIRI	634,772,000	644,272,000	158,693,000.00	158,693,000.00	158,693,000.00	168,193,000.00
42	MANGUNAN	1,182,913,000	1,076,450,000	295,728,250.00	295,728,250.00	295,728,250.00	189,265,250.00
43	MUNTUK	1,565,459,000	1,408,900,000	391,364,750.00	391,364,750.00	391,364,750.00	234,805,750.00
44	DLINGO	1,321,768,000	1,202,808,000	330,442,000.00	330,442,000.00	330,442,000.00	211,482,000.00
45	TEMUWUH	1,336,024,000	1,215,780,000	334,006,000.00	334,006,000.00	334,006,000.00	213,762,000.00
46	TERONG	1,100,711,000	1,100,711,000	275,177,750.00	275,177,750.00	275,177,750.00	275,177,750.00
47	JATIMULYO	1,396,340,000	1,270,669,000	349,085,000.00	349,085,000.00	349,085,000.00	223,414,000.00
48	BATURETNO	1,163,528,000	1,058,810,000	290,882,000.00	290,882,000.00	290,882,000.00	186,164,000.00
49	BANGUNTAPAN	1,773,238,000	1,595,900,000	443,309,500.00	443,309,500.00	443,309,500.00	265,971,500.00
50	JAGALAN	580,977,000	591,220,100	145,244,250.00	145,244,250.00	145,244,250.00	155,487,350.00

NO	DESA	PAGU DESA TA 2020 (Rp)	PAGU DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	ALOKASI PER TRIWULAN			
				TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
51	SINGOSAREN	601,632,000	611,132,000	150,408,000.00	150,408,000.00	150,408,000.00	159,908,000.00
52	JAMBIDAN	1,137,230,000	1,034,879,000	284,307,500.00	284,307,500.00	284,307,500.00	181,956,500.00
53	POTORONO	1,180,505,000	1,074,259,000	295,126,250.00	295,126,250.00	295,126,250.00	188,880,250.00
54	TAMANAN	1,264,056,000	1,150,290,000	316,014,000.00	316,014,000.00	316,014,000.00	202,248,000.00
55	WIROKERTEN	1,220,704,000	1,110,840,000	305,176,000.00	305,176,000.00	305,176,000.00	195,312,000.00
56	WONOKROMO	1,315,573,000	1,197,171,000	328,893,250.00	328,893,250.00	328,893,250.00	210,491,250.00
57	PLERET	1,376,886,000	1,252,966,000	344,221,500.00	344,221,500.00	344,221,500.00	220,301,500.00
58	SEGOROYOSO	1,210,763,000	1,101,794,000	302,690,750.00	302,690,750.00	302,690,750.00	193,721,750.00
59	BAWURAN	1,143,124,000	1,040,242,000	285,781,000.00	285,781,000.00	285,781,000.00	182,899,000.00
60	WONOLELO	1,042,851,000	1,042,851,000	260,712,750.00	260,712,750.00	260,712,750.00	260,712,750.00
61	SITIMULYO	1,715,326,000	1,543,793,000	428,831,500.00	428,831,500.00	428,831,500.00	257,298,500.00
62	SRIMULYO	1,922,598,000	1,730,330,000	480,649,500.00	480,649,500.00	480,649,500.00	288,381,500.00
63	SRIMARTANI	1,749,610,000	1,574,649,000	437,402,500.00	437,402,500.00	437,402,500.00	262,441,500.00
64	PENDOWOHARJO	1,688,099,000	1,519,289,000	422,024,750.00	422,024,750.00	422,024,750.00	253,214,750.00
65	TIMBULHARJO	1,895,755,000	1,706,179,000	473,938,750.00	473,938,750.00	473,938,750.00	284,362,750.00
66	BANGUNHARJO	1,916,872,000	1,725,184,000	479,218,000.00	479,218,000.00	479,218,000.00	287,530,000.00
67	PANGGUNGHARJO	1,779,536,000	1,600,582,000	444,884,000.00	444,884,000.00	444,884,000.00	265,930,000.00
68	BANGUNJIWO	2,298,598,000	2,058,738,000	574,649,500.00	574,649,500.00	574,649,500.00	334,789,500.00
69	TIRTONIRMOLO	1,564,835,000	1,408,351,000	391,208,750.00	391,208,750.00	391,208,750.00	234,724,750.00
70	TAMANTIRTO	1,582,361,000	1,424,124,000	395,590,250.00	395,590,250.00	395,590,250.00	237,353,250.00
71	NGESTIHARJO	1,578,058,000	1,420,252,000	394,514,500.00	394,514,500.00	394,514,500.00	236,708,500.00
72	ARGODADI	1,707,502,000	1,536,751,000	426,875,500.00	426,875,500.00	426,875,500.00	256,124,500.00
73	ARGOREJO	1,454,745,000	1,323,817,000	363,686,250.00	363,686,250.00	363,686,250.00	232,758,250.00

NO	DESA	PAGU DESA TA 2020 (Rp)	PAGU DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	ALOKASI PER TRIWULAN			
				TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN II (Rp)	TRIWULAN III (Rp)	TRIWULAN IV (Rp)
74	ARGOSARI	1,216,097,000	1,106,648,000	304,024,250.00	304,024,250.00	304,024,250.00	194,575,250.00
75	ARGOMULYO	1,509,286,000	1,358,357,000	377,321,500.00	377,321,500.00	377,321,500.00	226,392,500.00
J U M L A H		105,709,242,000.00	96,640,750,100	26,427,310,500.00	26,427,310,500.00	26,427,310,500.00	17,358,818,600.00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO